5_EKOTRANS_2011.pdf

by

Submission date: 22-May-2019 03:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 1134041576

File name: 5_EKOTRANS_2011.pdf (1.92M)

Word count: 2237

Character count: 14903

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Agussalim

Agussalim adalah Pembantu Rektor I dan Staf Pengajar
Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

Abstract

Poorness is disability of society in fulfilling requirement of minimum life. The happening of the poorness resulted from lameness in development cause indolence, stupidity, low productivity, housing improper, dirty health and low education storey for small society. Needed effort to do by government in overcoming poorness is to strengthening the side supply, improve skill and ability, develop strength of institution property of society and develop the cooperation networks between sector.

1. Dasar Pemikiran Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan ataupun menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam memilih suatu pendekatan dan strategi untuk memecahkan masalah kemiskinan diperlukan pemahaman dan kesamaan cara pandang terhadap problematika kemiskinan. Kesamaan cara pandang itu tidak saja harus dipahami oleh aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu lingkaran setan dari berbagai faktor yang menyebabkan buruknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang ditandai oleh standar hidup yang rendah seperti pendapatannya kecil dan tak menentu, perumahannya tidak layak, kesehatannya buruk dan tingkat pendidikannya rendah. Faktor penyebabnya adalah kemalasan, kebodohan, produktivitas rendah, kesehatan buruk, lingkungan kumuh dan lainnya yang terdapat pada diri manusianya maupun lokasi tempat tinggalnya, dianggap sebagai mata rantai yang saling mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan.

Di lain pihak, ada anggapan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari suatu ketidakadilan dan ketidakmerataan terhadap suatu kelompok masyarakat, sehingga mereka menderita miskin karena tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber mata pencaharian yang tersedia. Tatanan sosial, ekonomi dan politik tidak memberikan jaminan kepada semua pihak untuk memiliki kesempatan sama dalam berkontribusi terhadap pembangunan dan meraih kesejahteraan.

Kemiskinan - berdasarkan penyebabnya - dapat dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Kemiskinan alamiah timbul akibat sumberdaya alam, manusia maupun sumberdaya pembangunan lainnya yang langka (scarcity) jumlahnya dan/atau karena

perkembangan teknologi yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat berperan aktif dalam pembangunan. Kemiskinan struktural disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, kepemilikan sumberdaya tidak merata, kemampuan tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan, menyebabkan kesertaan masyarakat dalam pembangunan tidak merata. Kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, disebut sebagai kemiskinan absolut. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan apabila masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, namun masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat lainnya disebut sebagai kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan ekonomi dan peradaban manusia. Namun kemiskinan absolut dengan menggunakan ukuran minimum tertentu, keberadaanya masih dapat dihilangkan (Poverty allevation). Sedangkan kemiskinan relatif senantiasa terjadi jika perbedaan tingkat kesejahteraan antargolongan masyarakat terlihat secara nyata, sehingga keberadaannya tidak dapat dihilangkan tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya (poverty reduction).

Pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi yang merupakan strategi pembangunan selama ini diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat melalui efek tetesan (trickling down-effect). Namun dari berbagai fakta menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi kurang menyentuh kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Kenyataan lain juga mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang juga tidak merata antar wilayah (Kota-Desa), sehingga menimbulkan trade-off terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pelaku ekonomi yang kuat memiliki produktivitas tinggi dan dapat menikmati hasil yang lebih besar dibandingkan pelaku ekonomi yang lemah. Demikian pula yang terjadi dengan penduduk miskin, oleh karena minimnya kemampuan produktif yang dimiliki untuk ikut serta dalam proses pembangunan menyebabkan tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah ada.

Demikian pula yang terjadi pada wilayah (Kota-Desa) yang kurang mempunyai potensi dan terisolir cenderung kurang mendapatkan perhatian ataupun upaya-upaya pengembangannya. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah (Kota-Desa) tersebut semakin sulit melepaskan diri dari lilitan kemiskinan.

2. Kemiskinan Merupakan Buah dari Ketimpangan Pembangunan

Kebijakan yang bersifat liberal-kapitalistik dalam prakteknya lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok strategis tertentu, antara lain kelompok birokrat-cum-entrepreneur, yaitu para pemegang kekuasaan yang memanfaatkan posisinya untuk berwiraswasta beserta keluarganya, kelompok pengusaha yang tumbuh karena sponsor pemerintah dan lain-lain. Kesemuanya inilah yang secara potensial dapat memperbesar ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan yang pada akhirnya

dapat menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan dalam pembangunan wilayah (Kota-Desa). Beberapa fakta bentuk ketimpangan yang terjadi selama ini, antara lain :

- a. Ketimpangan kesempatan kerja, kenyataan yang terjadi bahwa ternyata sebagian besar kesempatan kerja masih disumbangkan oleh sektor pertanian
- b. Ketimpangan pertumbuhan antar sektor, yang disebabkan oleh proporsi investasi dalam orientasi pembangunan, alokasi kredit dalam kegiatan ekonomi, dan alokasi PMDN dan PMA dalam masing-masing sektor
- c. Ketimpangan pertumbuhan regional, ketimpangan ini terlihat dari dua dimensi, yakni kesenjangan antar daerah serta kesenjangan antar kota dan desa. Hal ini nampak bahwa kepadatan investasi dapat menggambarkan intensitas pembangunan, distribusi penduduk dan angkatan kerja serta luas area wilayah (Kota-Desa) yang bersangkutan.
- d. Ketimpangan asset produksi, ketimpangan ini berhubungan langsung dengan sumber-sumber permintaan, antara lain tingkat penguasaan tanah sebagai salah satu alat produksi baik di pedesaan maupun di perkotaan.
- e. Ketimpangan pengupahan, dimaksudkan disini adalah antar sektor maupun antar level dalam sektor yang sama.

Secara garis besar ketimpangan-ketimpangan diatas umumnya disebabkan oleh dua hal utama, yaitu :

- a. Market failure, hal ini terjadi karena kemampuan daya beli penduduk sangat rendah, utamanya dipedesaan, sempitnya kesempatan dan peluang berusaha, infrastruktur pedesaan yang tidak memadai, pola penguasaan tanah sebagai alat produksi vital di desa timpang, dan distribusinya mengalami hambatan pemasaran akibat terdesak oleh produk industri.
- b. Political failure, hal ini terjadi apabila struktur dan institusi ekonomi politik yang ada pada azas supra lokal telah menyebabkan distorsi dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat desa.

3. Usaha-Usaha Untuk Memperkecil Ketimpangan

Untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka ada beberapa usaha yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Perlunya Keterkaitan Fungsional dan Mutualisma, keterkaitan ini untuk mengimbangi polarisasi struktur ekonomi desa-kota (pertanian-industri), maka setidaknya ada tiga dimensi keterkaitan fungsional yang dapat dijadikan poros keterkaitan tersebut, yakni (1) output produk pertanian hendaknya dapat digunakan sebagai input bagi industri pengolahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti pola sub contracting, (2) kelebihan suplai tenaga kerja di pedesaan dapat dialihkan dan dimanfaatkan dalam sektor non pertanian dan industri, dan (3) surplus yang dihasilkan dari sektor sekunder dan tertier sebagian harus di-reinvestasikan untuk membangun sektor primer dan sarana penunjangnya.

Keterkaitan ini secara ekonomis dapat dirangsang melalui penyertaan masyarakat pedesaan dalam kepemilikan atau investasi disektor industri, seperti mereka yang memiliki lahan kemudian dijual untuk lokasi industri (pabrik), harus dihargai sebagai salah seorang pemegang saham sehingga tanah yang dijual selain bernilai nominal juga mempunyai nilai guna yang terus meningkat. Ataupun masyarakat disekitar industri yang tidak memiliki lahan tetapi terkena dampak industri perlu disertakan dalam pemilikan industri.

- b. Adanya Keinginan Politik, sebenarnya keinginan politik (*political will*) telah ada melalui Bapak-Anak Angkat, tetapi diperlukan *law enforcement* dan partisipasi masyarakat serta transparansi atas pelaksanaan dan manajemen pembangunan, agar tercapai dinamika ekonomi akan lebih tinggi dan ketimpangan dapat dipersempit melalui mekanisme yang bersifat ekonomis serta pengawasan kebocoran dan penyimpangan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan karena tingkat partisipasi masyarakat telah optimal.
- c. Menegakkan Demokratisasi, maksudnya adalah penegakan demokratisasi dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Demokrasi politik secara ideal adalah suatu hak bagi seluruh warganegara untuk memilih dan dipilih dalam melaksanakan pembangunan. Tolok ukur demokrasi yang dapat digunakan agar pembangunan berjalan dengan sempurna, adalah (1) kebebasan, (2) keadilan, yaitu akses yang sama setiap orang untuk dilindungi dan diayomi, (3) representasi politik, yakni seberapa jauh institusi politik benar-benar merupakan representasi dari rakyat, (4) artikulasi politik, dan (5) mekanisme kontrol.

4. Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum ada empat upaya yang perlu terus menerus diisi secara simultan dan terencana jika ingin mengentaskan kemiskinan, yaitu :

- a. Memperkuat sisi supply dengan aktivitas yang mampu mengangkat dan merangsang pusat-pusat pertumbuhan produksi rakyat kecil yang secara umum telah banyak dilakukan berbagai LSM/LPSM. Aktifitas pada sisi ini perlu tetap dipertahankan sebagai instrumen penting dalam upaya pengorganisasian masyarakat luas yang berdimensi politis. Kegiatan-kegiatan pada sisi ini selain berupaya untuk menggalang kemampuan ekonomis masyarakat pada tingkat akar rumput, juga dimaksudkan sebagai suatu latihan untuk menghadapi berbagai bentuk intervensi ekonomi eksternal, yang potensial dapat menyedot kembali surplus yang dapat dibangun bertahap oleh masyarakat setempat. Adapun aktifitas pada sisi ini antara lain dengan mengembangkan berbagai upaya seperti:
 - Pembentukan keterampilan spesifik dan keterampilan manajemen dikalangan masyarakat lemah.
 - Mengembangkan berbagai kemampuan tentang teknologi tepat guna yang mampu membantu masyarakat lapisan bawah.
 - Memasukkan input-input baru yang sesuai dengan kebutuhan setempat, termasuk mengembangkan kredit/*revolving fund* dan usaha bersama.
 - Mengembangkan kemampuan jasa-jasa penyuluhan dan informasi strategis, termasuk upaya penelitian yang dapat dikembangkan bersama LSPM/LSM lokal.
 - Pengembangan infra struktur, terutama jaringan komunikasi dan transportasi, penyediaan sarana pokok untuk meningkatkan taraf dan mutu hidup rakyat kecil.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan *policy advocacy* — bagi kelompok pendamping golongan marginal (dalam hal ini LSPM/Ornop) — agar pemerintah sungguh-sungguh melindungi produk usaha kecil (sisi *Demand*), dengan target mendapat tempat dalam sirkuit ekonomi nasional. Upaya tersebut antara lain meliputi : (1) melaksanakan undang-undang anti monopoli, (2) kebijakan nilai tukar (harga) yang dapat menguntungkan produk kelompok marginal, (3) peraturan yang memungkinkan produk-produk lokal dapat bersaing dengan berbagai produk luar negeri di pasar dalam negeri, (4) pengalokasian sumber daya

dan tata ruang yang jelas kekuatan hukumnya, terutama yang berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber daya (seperti : hasil-hasil hutan, tambang, laut dsb) untuk digunakan oleh masyarakat lokal, (5) pengaturan penyebaran sumber-sumber permintaan akan tenaga kerja dan produk lokal (keterkaitan) yang relatif merata untuk seluruh wilayah (Desa-Kota), dan (6) kebijakan umum industrialisasi yang mampu mendukung perekonomian lokal (tidak menjadi *enclave*) dengan berbagai program yang mampu menghubungkan dengan industri hulu dan hilir yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Berkaitan dengan proses relokasi industri, perlu dikembangkan berbagai syarat, antara lain : (1) investasi tersebut bukan sekedar mampir untuk mengeksploitasi sumber daya alam semata ; (2) investasi harus dapat membangkitkan dinamika ekonomi masyarakat lokal; (3) investasi harus dapat menyerap tenaga kerja lokal dan (4) perlu ada penyertaan masyarakat dalam hal pemilikan saham unit usaha¹

- c. Membangun kekuatan institusi milik masyarakat. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kontekstual, membangun kebersamaan, egalitarian dan bertumpu pada kekuatan sendiri. Misalnya dengan upaya membangun struktur kelembagaan masyarakat yang *bottom-up*, yang dilandasi dengan kehidupan yang demokratis dan pembelaan -pembelaan hukum terhadap lapisan masyarakat yang lemah. Memberikan prioritas terhadap kelompok sasaran yang jelas dari setiap upaya intervensi. Dalam keadaan belum memungkinkannya ekspansi partai politik sampai pedesaan, maka perlu dipikirkan model kerjasama dan aliansi antar organisasi kemasyarakatan yang ada sekarang (baik organisasi keagamaan maupun LSPM/Ornop), untuk memperkuat institusi murni masyarakat, terutama masyarakat dipedesaan.
- d. ¹ Membangun jaringan-jaringan kerjasama (*net working*) antar aktor yang mempunyai kepedulian perbaikan nasib kelompok marginal, baik secara regional, nasional maupun internasional, untuk memperkuat posisi tawar dalam rangka *policy advocacy*. Dalam hal ini *advocacy* dapat di alamatkan pada:
 - Pemerintah, untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan rakyat kecil/masyarakat luas.
 - Kelas menengah masyarakat, untuk menggugah kesadarannya tentang posisi masyarakat yang tertindas.
 - Kalangan intelektual, agar lebih peka terhadap fenomena kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan yang banyak dialami oleh rakyat kecil.
 - Lembaga donor, dalam upaya merubah mekanisme pertanggungjawaban ke atas dan meletakkan pertanggungjawaban terakhir kearah kelompok sasaran.

5. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa pengertian dasar dalam upaya menanggulangi kemiskinan, yaitu :

- a. Konsep kemiskinan yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.
- b. Terjadinya kemiskinan yang diakibatkan dari ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan menyebabkan kemalasan, kebodohan, produktivitas rendah, perumahan tidak layak, kesehatan kumuh dan tingkat pendidikan rendah bagi masyarakat kecil.
- c. Pada umumnya bentuk kemiskinan yang ada dalam masyarakat adalah kemiskinan alamiah, kemiskinan structural dan kemiskinan kultural. Namun jika dikaitkan

- antara tingkat pendapatan dan garis kemiskinan, maka kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
- d. Pemerintah perlu menciptakan keterkaitan fungsional & mutualisma, adanya keinginan politik dan menegakkan demokratisasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan akibat dari ketimpangan-ketimpangan pembangunan tersebut.
 - e. Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan adalah memperkuat sisi supply, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, membangun kekuatan institusi milik masyarakat dan membangun jaringan-jaringan kerjasama antar sektor.

Daftar Bacaan

- Hamsad Rangkuti. "*Sampah Bulan Desember*" (Kumpulan Cerita Pendek), Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2000.
- F.X. Sodjadi J. "*Pemikiran Dasar Konsep Keterpaduan Penangan Masalah Kemiskinan*" (PDKK-PMK), Majalah Manajemen, Jakarta, 1998.
- Gunawan Sumodiningrat. "*Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan*", Prisma Edisi Khusus 25 Tahun 1971-1996.

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ung.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off